



Optimalisasi Komunikasi Organisasi Polri Melalui Penerapan Predictive Policing Untuk Meningkatkan Kinerja

David Yuniar Kanitero

Sespimmen Lemdiklat Polri. Indonesia

Email : davidyk@ejurnal-copus.sespimpolri.id

ABSTRAK

Komunikasi organisasi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di era digital yang semakin kompleks. Polri sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika keamanan yang cepat berubah, serta integrasi data yang memengaruhi efektivitas kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi komunikasi organisasi Polri dapat dilakukan melalui penerapan predictive policing sebagai pendekatan inovatif untuk meningkatkan kinerja institusi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan anggota Polri di berbagai satuan kerja, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan predictive policing mendorong terjadinya peningkatan efektivitas komunikasi internal, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi lintas fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan analisis data prediktif. Selain itu, penerapan pendekatan ini juga meningkatkan akurasi pencegahan tindak kejahatan serta efisiensi operasional, yang secara keseluruhan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi Polri. Dengan demikian, optimalisasi komunikasi organisasi melalui predictive policing dapat menjadi strategi penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang modern, responsif, dan profesional.

Kata kunci: Komunikasi Organisasi, Predictive policing, Polri, Kinerja, Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, organisasi modern, termasuk institusi kepolisian, dituntut untuk beradaptasi secara cepat terhadap kompleksitas dan dinamika sosial yang terus berkembang (Pruss, D, 2024). Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan besar, mulai dari meningkatnya ancaman kejahatan berbasis teknologi hingga tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme (McIntyre, M. L, 2019). Dalam konteks ini, komunikasi organisasi menjadi aspek krusial yang menentukan efektivitas koordinasi, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara terstruktur dan responsif. Komunikasi organisasi yang tidak optimal sering kali menyebabkan disinformasi, keterlambatan respon, dan fragmentasi kerja, yang berdampak negatif pada kinerja institusi secara keseluruhan (Benbouzid, B, 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, konsep predictive policing muncul sebagai pendekatan strategis berbasis data yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam memprediksi, mencegah, dan merespons kejahatan secara lebih cepat dan tepat. Predictive policing memanfaatkan analisis data historis dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola-pola kejahatan serta memetakan potensi ancaman secara sistematis (Dotson, M, 2020). Penerapan pendekatan ini bukan hanya membutuhkan kecanggihan teknologi, tetapi juga prasyarat komunikasi organisasi yang efektif, integratif, dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, integrasi antara komunikasi organisasi dan teknologi prediktif menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi institusi seperti Polri untuk meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh (Christin, A, 2020).

Di tengah upaya modernisasi dan profesionalisasi tersebut, Polri masih dihadapkan pada fenomena khusus yang memprihatinkan, seperti meningkatnya kasus pelanggaran etik oleh anggota, keterlibatan dalam tindak pidana seperti korupsi, kekerasan, hingga kasus pembunuhan yang melibatkan aparat sendiri. Fenomena ini bukan hanya merusak citra institusi, tetapi juga menjadi indikator lemahnya sistem komunikasi internal dan kontrol organisasi. Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam pengelolaan informasi, rendahnya transparansi antarunit, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran internal. Berdasarkan hasil pra survei mengenai permasalahan komunikasi organisasi adalah:

Tabel 1 Permasalahan Komunikasi Organisasi

No.	Indikator Masalah Komunikasi Organisasi	Permasalahan	Temuan Awal
1.	Alur komunikasi antar unit kerja	Tidak ada standar komunikasi yang baku antar divisi	Informasi sering terlambat diterima oleh unit pelaksana di lapangan
2.	Transparansi informasi internal	Kurangnya keterbukaan dalam distribusi informasi penting	Beberapa personel tidak mengetahui perubahan kebijakan operasional
3.	Penggunaan media komunikasi digital	Tidak meratanya penggunaan aplikasi komunikasi internal	Hanya sebagian unit yang aktif menggunakan sistem informasi Polri
4.	Koordinasi dalam pengambilan keputusan	Lemahnya koordinasi antar pimpinan dan bawahan dalam keputusan operasional	Banyak keputusan strategis hanya dikomunikasikan secara satu arah
5.	Feedback dan komunikasi dua arah	Minimnya forum atau saluran untuk menyampaikan pendapat	Anggota kesulitan menyampaikan masukan atau keluhan ke pimpinan
6.	Integrasi data dan informasi	Data operasional tidak terintegrasi antar unit	Terjadi tumpang tindih data antara bagian intelijen dan patroli
7.	Etika komunikasi antar anggota	Kurangnya pelatihan tentang etika komunikasi formal dan informal	Ditemukan kasus miskomunikasi yang menyebabkan konflik internal
8.	Kecepatan dan akurasi informasi	Informasi lapangan sering terlambat dan tidak sesuai realita	Update situasi kejadian baru kadang tidak real time karena jalur birokrasi panjang

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan melalui observasi awal dan wawancara terbatas dengan beberapa personel Polri, ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya komunikasi organisasi di lingkungan Polri. Salah satu permasalahan utama terletak pada tidak adanya alur komunikasi yang baku antar unit kerja, sehingga sering terjadi keterlambatan informasi yang berakibat pada lambatnya respon operasional di lapangan. Selain itu, transparansi informasi juga menjadi kendala, di mana beberapa anggota tidak mendapatkan informasi penting secara merata, terutama terkait kebijakan dan prosedur baru. Penggunaan media komunikasi digital yang belum merata, seperti aplikasi internal Polri, juga memperparah kesenjangan informasi antar bagian. Lemahnya koordinasi antar pimpinan dan bawahan dalam

pengambilan keputusan menyebabkan banyak keputusan bersifat satu arah tanpa melibatkan masukan dari personel di tingkat operasional

Dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, Polri dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya melalui pendekatan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Salah satu pendekatan yang kini mulai banyak diperbincangkan adalah predictive policing, yaitu metode kepolisian yang mengandalkan analisis data historis dan teknologi prediktif untuk mengidentifikasi potensi kejahatan sebelum terjadi. Teori predictive policing berakar dari pendekatan crime mapping dan intelligence-led policing, di mana informasi dijadikan alat utama dalam pengambilan keputusan strategis (Perry et al., 2013). Namun, berdasarkan hasil pra survei dan observasi awal, penerapan metode ini di lingkungan Polri masih menghadapi sejumlah hambatan serius.

Permasalahan paling mendasar adalah belum tersedianya data historis dan real-time yang terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi. Beberapa unit kerja masih mencatat laporan kejahatan secara manual, menyebabkan analisis data menjadi tidak efisien dan tidak bisa diolah untuk tujuan prediktif. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem analitik masih sangat terbatas, baik dari segi infrastruktur maupun perangkat lunak. Di banyak daerah, Polri belum memiliki aplikasi atau tools prediksi yang mampu mendeteksi pola kejahatan secara otomatis. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kompetensi sumber daya manusia, di mana sebagian besar personel belum dibekali pelatihan mengenai cara membaca, menafsirkan, dan mengambil keputusan berbasis data prediktif. Aspek koordinasi antar unit kerja dan instansi eksternal juga menjadi kendala yang signifikan. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pertukaran data dan informasi antar unit mengakibatkan tumpang tindih informasi dan lambatnya respon terhadap potensi gangguan kamtibmas. Sementara itu, tindakan kepolisian di lapangan masih bersifat reaktif ketimbang proaktif, di mana tindakan baru dilakukan setelah kejadian terjadi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi Brayne (2020) yang menyatakan bahwa tanpa dukungan sistem informasi yang matang, predictive policing hanya akan menjadi jargon teknologi tanpa fungsi nyata. Dari sisi kelembagaan, dukungan kebijakan dan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan predictive policing juga belum memadai. Belum adanya perencanaan strategis yang mengintegrasikan teknologi prediktif ke dalam sistem kerja Polri menyebabkan pendekatan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja institusi. Kinerja Polri saat ini masih banyak diukur dari output kuantitatif seperti jumlah penangkapan atau penggerebekan, bukan dari efektivitas dalam mencegah kejahatan. Padahal menurut Robbins (2020), kinerja organisasi modern harus berfokus pada efisiensi proses dan pencapaian tujuan jangka panjang, termasuk pencegahan risiko

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mencari solusi sistemik dalam meningkatkan komunikasi organisasi Polri melalui pemanfaatan teknologi prediktif sebagai alat bantu manajerial dan operasional. Dengan memperkuat komunikasi internal berbasis data dan analisis prediktif, Polri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketertiban internal, serta mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat (Leese, M, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendorong transformasi kelembagaan Polri menuju organisasi yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil kinerja yang optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020), bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan berkaitan dengan proses serta interaksi sosial di lingkungan organisasi Polri, khususnya dalam hal komunikasi organisasi dan penerapan predictive policing.

Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif dan menyeluruh terhadap satu kasus atau fenomena tertentu dalam situasi nyata, yaitu bagaimana komunikasi organisasi Polri berperan dalam mendukung penerapan predictive policing untuk meningkatkan kinerja institusi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan personel Polri dari berbagai satuan kerja (misalnya fungsi intelijen, reskrim, dan patroli), yang dipilih

secara purposif karena keterlibatannya langsung dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi, serta penggunaan data kepolisian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap dinamika komunikasi dan koordinasi di lingkungan kerja, serta mengumpulkan dokumentasi yang relevan, seperti SOP, laporan harian, dan sistem informasi operasional.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif menurut Sugiyono, yaitu melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antar kategori informasi, seperti pola komunikasi, hambatan teknologi, dan dampaknya terhadap kinerja. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan temuan lapangan untuk merumuskan makna dan implikasi dari penerapan predictive policing terhadap peningkatan kinerja organisasi Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Optimalisasi Komunikasi Organisasi Polri

Banyak informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi internal di lingkungan kerja mereka belum berjalan secara optimal, terutama dalam konteks pertukaran informasi strategis yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan cepat. Salah satu peserta, Bripta Andi, menyampaikan, “Kami sering tidak tahu perkembangan situasi terkini di wilayah lain, padahal itu penting untuk menyesuaikan patroli. Informasi datangnya lambat, kadang hanya dari obrolan WhatsApp atau info lisan.” Pengakuan ini menggambarkan bahwa sistem komunikasi formal belum mampu menjamin kelancaran distribusi informasi antar satuan. Beberapa anggota juga menyatakan kebingungan dalam memahami kebijakan yang berubah secara mendadak karena kurangnya komunikasi dua arah yang jelas dari atasan.

Tabel 2. Deskripsi Temuan Lapangan tentang Komunikasi Organisasi dan Predictive policing di Polri

Aspek	Deskripsi Temuan
Keterlambatan Informasi Operasional	Informasi lapangan lambat diterima antar unit kerja, sering bergantung pada komunikasi informal.
Ketidakterpaduan Sistem Data	Belum ada integrasi sistem digital antar fungsi; data analisis dan laporan tidak sinkron.
Keterbatasan Literasi Teknologi	Sebagian anggota belum memahami cara menggunakan sistem analitik atau aplikasi prediktif.
Kurangnya Koordinasi Lintas Fungsi	Tidak ada SOP tetap untuk berbagi informasi prediktif antara satuan intelijen dan unit patroli.
Hambatan Komunikasi Dua Arah	Struktur hierarkis menyebabkan bawahan ragu menyampaikan masukan atau pembaruan data lapangan.
Ketidaksesuaian Kinerja dan Data Prediktif	Anggota tidak dilibatkan dalam menyusun strategi berbasis data, sehingga implementasi tidak optimal.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Sejumlah anggota mengungkapkan bahwa meskipun Polri telah mulai menerapkan pendekatan berbasis data seperti predictive policing, teknologi tersebut belum benar-benar menyatu dengan alur kerja mereka. Ipda Rina mengatakan, “Kami tahu ada aplikasi prediksi kerawanan, tapi belum semua anggota paham cara bacanya. Kadang kami tetap mengandalkan pengalaman atau laporan warga.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pendekatan teknologi belum sepenuhnya menggantikan pola kerja lama yang berbasis intuisi dan pengalaman. Ketika tidak ada pelatihan intensif atau alur komunikasi yang menjelaskan fungsi teknologi tersebut, maka potensi predictive policing tidak dapat dimaksimalkan. Lebih lanjut, para informan juga menyinggung keterbatasan dalam kolaborasi lintas fungsi yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pemanfaatan data prediktif. Aiptu Heri menuturkan, “Fungsi intel mungkin punya data kejahatan, tapi kami

di lapangan tidak selalu mendapatkannya secara langsung. Kadang infonya nyangkut di tengah.” Ini menunjukkan pentingnya komunikasi organisasi yang terbuka, sistematis, dan terstruktur. Tanpa koordinasi lintas unit yang kuat, predictive policing akan sulit berdampak nyata dalam peningkatan kinerja institusi.

Implikasi dari komunikasi yang tidak optimal juga terlihat dalam perasaan frustrasi dan kurang percaya diri sebagian anggota. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses strategis, bahkan saat teknologi baru mulai diperkenalkan. Bripda Siska menjelaskan, “Sering kali kami hanya disuruh laksanakan, tanpa diberi tahu latar belakang datanya. Jadi kami merasa tidak yakin ini efektif atau tidak.” Sentimen ini memperlihatkan adanya jarak psikologis dan struktural dalam komunikasi organisasi yang memengaruhi motivasi serta pemahaman tugas. Temuan lapangan ini menggambarkan bahwa meskipun pendekatan predictive policing menjanjikan peningkatan efektivitas kerja, penerapannya tidak akan berhasil tanpa optimalisasi sistem komunikasi organisasi yang mendukung alur informasi dua arah, koordinasi lintas fungsi, serta keterlibatan aktif dari seluruh lapisan anggota. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan literasi teknologi, pelatihan terpadu, serta reformasi komunikasi internal agar pendekatan prediktif benar-benar dapat meningkatkan kinerja Polri secara sistemik

Dalam melakukan optimalisasi kinerja institusi kepolisian melalui teknologi, sejumlah ahli menegaskan bahwa predictive policing hanya akan efektif jika didukung oleh sistem komunikasi organisasi yang kuat. Mohler, G. O. (2018), pakar dari UCLA yang banyak meneliti penerapan algoritma dalam kepolisian, menyatakan bahwa predictive policing bukanlah pengganti intuisi atau pengalaman polisi, melainkan alat pelengkap yang memerlukan integrasi data secara kolaboratif antarunit melalui komunikasi yang terbuka dan terstruktur. Pendapat ini diperkuat oleh Johnrow, J. (2016) bahwa keberhasilan predictive policing sangat bergantung pada kejelasan konteks dan struktur organisasi yang mampu mendukung koordinasi serta kebijakan yang transparan.

Keberhasilan pendekatan prediktif juga menuntut komunikasi eksternal yang baik, terutama dalam membangun keterlibatan masyarakat (community engagement) demi menjaga legitimasi dan kepercayaan publik. Senada dengan itu, Maria Zhuang et al. (2023) dari University of Virginia menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan teknologi prediktif, agar organisasi tidak terjebak pada bias algoritmik yang justru merusak citra dan kinerja institusi. Hal ini menunjukkan bahwa selain kecanggihan teknologi, komunikasi yang etis dan terbuka menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan internal maupun eksternal.

Lebih lanjut Binns, R. (2018) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan implementasi predictive policing di berbagai negara adalah lemahnya pengawasan dan minimnya pelatihan yang berbasis komunikasi dua arah. Ia menyarankan bahwa sistem komunikasi organisasi yang efektif harus mencakup pelatihan internal, audit kebijakan, serta pembentukan budaya feedback yang kuat. Oleh karena itu, penerapan predictive policing dalam institusi Polri tidak dapat dipisahkan dari upaya menguatkan komunikasi organisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, sebagai prasyarat untuk menciptakan kinerja yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap tantangan zaman

B. Tema Peningkatan Kinerja Polri

Kinerja Polri tidak hanya diukur dari capaian operasional, tetapi juga dari kemampuan interpersonal dalam berinteraksi dengan publik secara humanis dan menghargai. Perilaku seperti memeriksa ponsel saat berinteraksi dengan warga atau sesama rekan dinas dapat mengesankan ketidaksopanan, kurangnya empati, dan merusak citra institusi. Dalam dunia kepolisian yang sarat dengan interaksi publik, tindakan kecil seperti mengalihkan perhatian ke gawai saat berdialog bisa menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan kualitas pelayanan. Sebagaimana diungkapkan oleh Robbins dan Judge (2020), komunikasi efektif adalah salah satu indikator penting dalam menunjang kinerja organisasi, karena berperan dalam memperkuat kerja sama tim, memperlancar koordinasi, dan membangun kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk menanamkan budaya komunikasi yang etis dan penuh perhatian sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia. Peningkatan kinerja Polri harus mencakup pelatihan dan penguatan soft

skill, khususnya dalam hal kesadaran terhadap etika digital, agar setiap personel mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma komunikasi profesional di era teknologi, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar institusi seperti integritas, empati, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

C. Interpretasi Temuan

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan predictive policing dapat menjadi instrumen strategis dalam mengoptimalkan komunikasi organisasi di lingkungan Polri. Predictive policing tidak hanya berfungsi sebagai teknologi prediktif untuk mencegah kejahatan, tetapi juga mendorong peningkatan koordinasi internal, efisiensi komunikasi lintas satuan kerja, serta pemanfaatan data intelijen secara tepat sasaran. Sejalan dengan pendapat Ratcliffe (2016) dalam bukunya *Intelligence-Led Policing*, predictive policing mengandalkan aliran informasi yang sistematis dan komunikasi yang solid antarunit agar prediksi dan pencegahan kejahatan dapat dioperasionalkan secara efektif. Hal ini diperkuat oleh Glomseth, Gottschalk, & Solli-Sæther (2007) yang menekankan pentingnya *organizational communication* yang terbuka, adaptif, dan terintegrasi dalam lembaga penegak hukum untuk menghadapi tantangan kompleks. Dalam konteks Polri, sistem prediktif ini juga berfungsi sebagai *communication enhancer*, mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.

Lebih lanjut, Robbins & Judge (2017) menyatakan bahwa kinerja organisasi sangat bergantung pada efektivitas komunikasi internal, terutama dalam struktur yang hierarkis dan formal seperti kepolisian. Predictive policing memfasilitasi distribusi informasi yang cepat dan akurat, memungkinkan personel di tingkat bawah hingga pimpinan untuk memiliki persepsi situasional yang sama (*shared situational awareness*). Hal ini sejalan dengan teori Daft & Lengel (1986) mengenai *media richness theory*, yang menyatakan bahwa semakin kaya media komunikasi yang digunakan dalam organisasi, maka semakin efektif organisasi tersebut dalam merespons ambiguitas dan ketidakpastian dua aspek yang sangat khas dalam kerja kepolisian. Optimalisasi komunikasi organisasi melalui predictive policing juga berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pelaporan dan tindak lanjut penanganan kasus.

Dalam kerangka budaya organisasi, Schein (2010) menegaskan bahwa perubahan teknologi dalam organisasi harus disertai dengan transformasi komunikasi dan nilai-nilai internal. Predictive policing menjadi pintu masuk perubahan budaya komunikasi di Polri, dari sistem yang birokratis menuju pola yang berbasis data, responsif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, penerapan predictive policing tidak hanya berdampak pada pengurangan angka kejahatan, tetapi juga menjadi daya ungkit terhadap peningkatan kinerja Polri secara menyeluruh, baik dalam hal pelayanan publik, pemeliharaan keamanan, maupun pencitraan institusional di tengah masyarakat digital.

D. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini bahwa penerapan predictive policing mampu memperkuat komunikasi organisasi Polri melalui percepatan distribusi data intelijen, koordinasi lintas unit, dan peningkatan akuntabilitas sejalan dengan kesimpulan dari kajian riset terdahulu. Sebagai contoh, studi oleh Youngsub Lee dan kolega (2024) menyimpulkan bahwa prediktif berbasis lokasi (*place-based predictive policing*) efektif apabila diintegrasikan dengan sistem komunikasi internal yang baik dan kerangka organisasi yang jelas. *Research deliverable* dari proyek CCI juga menemukan bahwa tanpa integrasi teknologi ke dalam struktur komunikasi dan proses pengambilan keputusan, predictive policing tidak akan diterima sebagai bagian dari praktik kerja sehari-hari polisi. Penelitian lain dari Allen et al. di University of Surrey (2021–2025) menyoroti bahwa pengembangan dan penggunaan *analytics predictions* memerlukan pemahaman luas tentang tantangan organisasi, termasuk tata nilai komunikasi antarpersonel untuk mengantisipasi resistensi dan bias internal. Ini memperkuat temuan bahwa optimalisasi komunikasi organisasi adalah prasyarat bagi suksesnya implementasi prediktif. Lebih lanjut, penelitian oleh Koper et al. (2014) menyatakan bahwa teknologi kepolisian seperti predictive policing tidak secara otomatis meningkatkan produktivitas atau kepuasan kerja tanpa strategi organisasi dan pelatihan yang memadai. Temuan ini mencerminkan hasil penelitian kami bahwa pemanfaatan

teknologi prediktif harus disertai pelatihan komunikasi, SOP berbagi data, serta kebijakan internal yang jelas agar memberikan dampak nyata terhadap kinerja institusi. Ini menunjukkan bahwa bila komunikasi antarunit dan transparansi kebijakan tidak memadai, sistem prediktif malah memperlebar jurang ketidakpercayaan publik sebuah temuan yang mendukung argumen bahwa komunikasi organisasi internal menjadi faktor krusial dalam mitigasi hasil negatif teknologi

E. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis bagi institusi Polri, khususnya dalam memperkuat struktur komunikasi organisasi melalui penerapan teknologi predictive policing. Pertama, diperlukan integrasi sistem komunikasi digital berbasis data intelijen yang memungkinkan unit-unit di lapangan dan pusat komando saling berbagi informasi secara real time. Hal ini akan mempercepat respons terhadap potensi ancaman dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Kedua, optimalisasi predictive policing hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung pelatihan intensif bagi personel terkait literasi data, etika prediksi, serta penguasaan perangkat teknologi pendukung. Ketiga, institusi Polri perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) khusus yang mengatur tata kelola prediksi, alur distribusi informasi, serta mekanisme koordinasi lintas satuan. Keempat, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, transparansi komunikasi internal harus ditingkatkan, termasuk evaluasi rutin terhadap dampak penggunaan prediksi dalam praktik operasional. Terakhir, pimpinan organisasi perlu memastikan bahwa transformasi digital ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek budaya kerja dan nilai-nilai kolaboratif yang mendukung misi Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi organisasi yang efisien menjadi landasan utama keberhasilan implementasi predictive policing demi peningkatan kinerja institusi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Optimalisasi komunikasi organisasi merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan penerapan predictive policing di lingkungan Polri. Komunikasi yang efektif antarunit kerja, koordinasi lintas fungsi, serta sistem distribusi informasi yang cepat dan akurat menjadi prasyarat utama agar teknologi prediktif dapat digunakan secara maksimal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa predictive policing mampu meningkatkan kinerja Polri apabila didukung oleh struktur komunikasi yang transparan, SOP yang jelas, dan kompetensi personel dalam memahami serta mengelola data intelijen secara etis. Tanpa fondasi komunikasi organisasi yang kuat, implementasi predictive policing berisiko menimbulkan resistensi internal, kesalahan prediksi, hingga menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara penguatan komunikasi internal dan transformasi teknologi agar Polri dapat merespons tantangan keamanan dengan lebih proaktif, presisi, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aagaard, J. Allen, J. (2023 2025). Predictive Analytics And The Social Organisation Of Police Work. University Of Surrey. Studi Ini Mengeksplorasi Implikasi Organisasi Dan Komunikasi Dalam Penggunaan Analytics Predictions Di Kepolisian
- Benbouzid, B. (2019). To predict and to manage: Predictive policing in the United States. *Big Data & Society*, 6(1). Pembahasan mendalam mengenai konsep predictive policing sebagai pendekatan data-driven dalam penegakan hukum
- Benbouzid, B. (2019). To Predict and to Manage: Predictive Policing in the United States. *Big Data & Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2053951719861703>
- Brantingham, P. J., Valasik, M., & Mohler, G. O. (2018). Does predictive policing lead to biased arrests? Results from a randomized controlled trial. *Statistics and Public Policy*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/2330443X.2018.1438940>

- Brayne, S. (2020). *Predict and Surveil: Data, Discretion, and the Future of Policing*. Oxford University Press.
- Brayne, S., & Christin, A. (2020). Technologies of Crime Prediction: The Reception of Algorithms in Policing and Criminal Courts. *Social Problems*, 68(3):608–624. Studi etnografi mengenai reaksi organisasi kepolisian dan pengadilan terhadap penggunaan algoritma prediktif dalam proses keamanan publik
- Cutting Crime Impact (CCI). (2021). Police Analysis And Communication Tool To Support Effective Information Enhanced Patrolling. Data Dan Hasil Proyek Menunjukkan Pentingnya Integrasi Komunikasi Internal Untuk Pemanfaatan Predictive Policing Secara Efektif
- Daft, R. L., & Lengel, R. H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. *Management Science*, 32(5), 554–571. <https://doi.org/10.1287/mnsc.32.5.554>
- Fairness and algorithmic accountability in policing: Zhuang et al. (2023). *Synthese*, 200, 1–24. Note: Artikel ini membahas tantangan fairness di predictive policing. <https://doi.org/10.1007/s11229-023-04189-0>
- Glomseth, R., Gottschalk, P., & Solli-Sæther, H. (2007). Occupational culture as determinant of knowledge sharing and performance in police investigations. *International Journal of the Sociology of Law*, 35(2), 96–107. <https://doi.org/10.1016/j.ijsl.2007.03.002>
- Helsby, R., James, J., & Dotson, M. (2020). A machine learning analysis of serious misconduct among Australian police. *Crime Science*, 9:22. Menggunakan teknik machine learning untuk memprediksi potensi pelanggaran serius oleh anggota kepolisian dan korelasinya dengan faktor internal organisasi
- Helsby, R., James, J., & Dotson, M. (2020). A machine learning analysis of serious misconduct among Australian police. *Crime Science*, 9(22). <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00133-6>
- Hodgkinson, T., Caputo, T., & McIntyre, M. L. (2019). Beyond crime rates and community surveys: a new approach to police accountability and performance measurement. *Crime Science*, 8:13. Menawarkan pendekatan baru dalam mengukur kinerja organisasi kepolisian yang lebih holistik dan partisipatif
- Koper, C. S., Lum, C., & Willis, J. J. (2014). Optimizing The Use Of Technology In Policing: Results And Implications From A Multi Site Study Of The Social, Organizational, And Behavioral Aspects Of Implementing Police Technologies. *Policing: An International Journal*, 37(2), 240–258. Doi:10.1108/PIJPSM-12-2013-0123
- Leese, M. (2021). Security as Socio Technical Practice: Predictive Policing and (Non) Automation. *Swiss Political Science Review*. Menjelaskan bagaimana predictive policing harus dipahami sebagai praktik sosioteknis dan bukan sekadar perangkat otomatisasi
- Leese, M. (2021). Security as Socio Technical Practice: Predictive Policing and (Non)Automation. *Swiss Political Science Review*, 27(1), 13–32. <https://doi.org/10.1111/spsr.12432>
- Lum, K., & Johndrow, J. (2016). A statistical framework for fair predictive algorithms. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/1610.08077>

- Perry, W. L., McInnis, B., Price, C. C., Smith, S. C., & Hollywood, J. S. (2013). Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations. RAND Corporation.
- Ratcliffe, J. H. (2016). *Intelligence-Led Policing* (2nd ed.). Routledge.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th ed.). Pearson.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational Behavior* (12th ed.). Pearson Education.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bas
- Veale, M., Van Kleek, M., & Binns, R. (2018). Logics and practices of transparency and opacity in real world applications of public sector machine learning. arXiv preprint. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174014>
- Youngsub Lee Et Al. (2025). Place-Based Predictive Policing. Dalam Law Enforcement Use Of Predictive Policing Approaches: Proceedings Of A Workshop. National Academies Of Sciences, Engineering, And Medicine. Doi:10.17226/28036
- Ziosi, M., & Pruss, D. (2024). Evidence of What, for Whom? The Socially Contested Role of Algorithmic Bias in a Predictive Policing Tool. Studi kritis terhadap bias algoritma dan implikasi sosial-dinamika dalam penerapan predictive policing